

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN (ISTRI) KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

A. KAJIAN TEORITIS

A. 1. PERLINDUNGAN HUKUM

Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) kata dasar pembentuknya, yakni “perlindungan” dan “hukum”. *Black’s Law Dictionary* menggunakan kata “*protection*” untuk perlindungan dan mendefinisikannya sebagai “*the act of protecting*”¹, yang berarti perbuatan dalam rangka memberikan perlindungan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*, perlindungan memuat 2 (dua) pengertian, yakni tempat berlindung dan hal memperlindungi². Dengan demikian, tempat berlindung menyangkut tempat para subyek mendapatkan perlindungan sedangkan hal memperlindungi menyangkut perbuatan untuk memberikan perlindungan.

Dari dua definisi mendasar tersebut, dapat dimengerti bahwa perlindungan memuat unsur subyek yang melakukan perbuatan perlindungan, obyek perlindungan dan tempat dimana subyek mendapatkan perlindungan.

Definisi mengenai “legal” untuk hukum berdasarkan berbagai sumber hukum, hukum tidak mempunyai satu rumusan yang seragam dan baku yang dapat memuaskan seluruh pihak. Pandangan kaum positivis yang diwakili oleh *Austin*,

¹ *Bryan A. Garner, Op.Cit., p. 1343.*

² Kamus Besar Bahasa Indonesia online, diakses 8 Oktober 2014.

Hart, dan *Kelsen* misalnya³, mereka memandang hukum sebagai aturan yang dibuat oleh penguasa. Kaum positivis juga berpendapat bahwa hukum merupakan perintah dan sanksi, seperti yang dikemukakan oleh *Austin*⁴. Kaum positivis tidak menganggap moral sebagai bagian utama dari hukum, sebaliknya moral harus sedapat mungkin tidak mendapatkan tempat dalam hakikat hukum. *Kelsen* merupakan ahli hukum dari kaum positivis yang berpendapat demikian.

Berbeda dengan para ahli kaum positivis, *Dworkin* justru berpendapat bahwa esensi aturan hukum adalah pencerminan moral⁵. Lanjut *Dworkin*, di dalam hukum terkandung nilai-nilai moral, dengan demikian yang menentukan bahwa suatu aturan itu merupakan suatu aturan hukum atau bukan adalah isi aturan itu, yaitu adakah aturan itu memancarkan prinsip moral atau tidak⁶. Dalam hal demikian, tidak peduli apakah peraturan itu dibuat oleh penguasa atau tumbuh berkembang dalam masyarakat atau merupakan kreasi hakim sepanjang isi peraturan itu memancarkan prinsip-prinsip moral, aturan itu dapat dikatakan hukum⁷.

Mengenai hukum, Penulis setuju dengan hakikat hukum yang didefinisikan oleh *Roscoe Pound*, bahwa “*law is a body of ideals, principles, and precepts for the adjustment of the relations of human beings and the ordering of their conduct in society*”⁸. Inti dari pendapat *Pound* tersebut adalah bahwa hukum merupakan

³ Peter Mahmud, *Op.Cit.*, h. 56-65.

⁴ Hart hal.25

⁵ Peter Mahmud, *Op.Cit.*, h. 66.

⁶ Peter Mahmud, *Op.Cit.*, h. 67

⁷ Peter Mahmud, *Loc.Cit.*

⁸ Titon Slamet Kurnia, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, 2009, h. 3-4.

seperangkat prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah hukum dan aturan-aturan hukum dalam rangka penataan suatu masyarakat dan kehidupannya.

Terdapat beberapa ahli hukum yang mengemukakan pendapat mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah tindakan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹
2. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau dengan kata lain sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁰
3. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹¹
4. Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak

⁹ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diunduh pada Jumat, 19 agustus 2016, pukul 16.55WIB

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹²

5. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹³
6. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁴

Dari beberapa pengertian mengenai perlindungan hukum menurut beberapa ahli dapat dirumuskan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum.

¹² *Ibid.*

¹³ Setiono, *Rule of Law* (Supremasi Hukum), (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjan Universitas Sebelas Maret, 2004) hal.3. dalam repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28784/4/Chapter%201.pdf diunduh pada tanggal Jumat, 19 Agustus 2016, pukul 16.55 WIB

¹⁴ *Ibid.*

A. 1. a Konsepsi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum, merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum, karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan awal lahirnya hubungan hukum yaitu interaksi antar subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum., sehingga akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama yang lain. Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan subyek hukum.

Perlindungan hukum akan menjadi hak setiap warga, namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Selain itu didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang perlindungan terhadap hak asasi, lahirnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakkan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian kepada warga negaranya.

Terdapat dua (2) jenis perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif¹⁵. Pada perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

¹⁵ Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, op.cit.*, h.2

Perlindungan hukum sangat penting dilakukan, karena dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut¹⁶:

a. Tegaknya supremasi hukum

Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.

b. Tegaknya keadilan

Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan.

c. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat

Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan.

¹⁶ <http://pkn-ips.blogspot.co.id/2015/03/konsep-dan-arti-penting-perlindungan-dan-Penegakan-Hukum.html/> diunduh pada tanggal 19 Agustus 2016, pukul 18.00WIB

A. 1. b Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Unsur-unsur perlindungan hukum merupakan hal-hal yang menjadi bagian dari perlindungan hukum. Dari definisi perlindungan hukum yang telah dikemukakan, dapat dimengerti bahwa unsur-unsur utama dalam perlindungan hukum meliputi subyek hukum, obyek hukum, dan hukum itu sendiri. Subyek hukum berkaitan dengan pribadi hukum yang melaksanakan perlindungan hukum dan yang dilindungi oleh hukum, obyek hukum berkaitan dengan segala sesuatu yang melekat pada subyek hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan hukum itu sendiri berkaitan dengan seluruh prinsip atau asas hukum dan peraturan-peraturan yang dibentuk oleh penguasa (Pemerintah).

a. Subyek Hukum Perlindungan Hukum

Menurut *Salmond*, *person* dapat dibedakan antara manusia dan bukan manusia¹⁷. Lebih lanjut *Salmond* memaparkan bahwa dalam literatur Bahasa Inggris manusia diistilahkan dengan *natural person* atau dalam Bahasa Belanda disebut *natuurlijke person* atau dalam Bahasa Indonesia disebut orang, sedangkan yang bukan manusia biasanya dalam Bahasa Inggris disebut *legal person* atau dalam Bahasa Belanda disebut *rechtspersoon* dan dalam bahasa Indonesia disebut badan hukum¹⁸.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, semua manusia merupakan subjek hukum selama ia masih hidup, yaitu sejak saat dilahirkan sampai meninggal dunia¹⁹. Bahkan dalam sistem *Civil Law* dikenal ungkapan (maxim) *nasciturus pro iam nato habetur*, yang dimuat dalam Pasal 2 BW, yang menetapkan bahwa anak dalam kandungan

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 207.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit.*

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 266.

seorang wanita dianggap telah lahir, setiap kali kepentingannya menghendakinya. Bila telah mati waktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada²⁰. Dengan demikian, baik laki-laki ataupun perempuan, berapapun usia seseorang, dan apapun status sosial, politik, dan budayanya adalah subyek hukum dimana perlindungan hukum melekat padanya.

Negara, bagian-bagian negara seperti daerah dan kota, perseroan terbatas, dan koperasi, merupakan badan-badan hukum yang juga pada mereka melekat perlindungan hukum. Negara dan bagian-bagian Negara termasuk dalam kategori badan hukum publik, sedangkan perseroan terbatas dan koperasi termasuk dalam kategori badan hukum privat²¹. Khusus bagi Negara, ia dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang aktif dan pasif dalam perlindungan hukum karena selain melekat perlindungan hukum padanya Negara juga dibebankan kewajiban oleh hukum untuk melindungi dan memenuhi hak-hak rakyatnya. Negara berhak memaksa rakyat untuk taat pada hukum yang semata-mata demi terwujudnya perlindungan hukum bagi seluruh rakyatnya.

b.Obyek Hukum Perlindungan Hukum

Dalam konsideran Huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgem, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi,

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

atau dirampas oleh siapapun²². Prinsip tersebut sekaligus menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan obyek hukum yang melekat pada subyek hukum yang harus dijamin perlindungan, penghormatan, dan pemeliharaannya oleh hukum.

Menurut Niken Savitri:

“Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki secara kodrati tanpa pengecualian dan keistimewaan bagi golongan, kelompok maupun tingkat sosial manusia tertentu. Hak-hak tersebut mencakup antara lain hak atas kehidupan, keamanan, kebebasan berpendapat dan merdeka dari segala bentuk penindasan yang wajib dijunjung tinggi, tidak saja oleh setiap individu dari suatu Negara yang mengakui keberadaan dan menghargai HAM itu sendiri, namun harus pula dijamin oleh Negara tanpa ada perkecualiannya”²³.

Negara sebagai *legal person* harus dapat memenuhi sekaligus melindungi hak-hak asasi rakyatnya dalam setiap hubungan hukum yang terjadi antar individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok dalam masyarakat. Negara, yang direpresentasikan oleh Pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya, seperti kekuasaan Legislatif dan Yudisial, harus secara aktif membuktikan bahwa kekuasaan dan kewenangan yang dipercayai oleh rakyat kepada Negara semata-mata digunakan untuk menjamin hak-hak rakyat terpenuhi atau tidak disalahgunakan. Misalnya, kekuasaan Eksekutif dan Legislatif membuat, melaksanakan, dan mengawasi penerapan Undang-Undang yang mengatur tentang pemenuhan hak setiap orang untuk bebas dari penganiayaan dan kekerasan, khususnya bagi seluruh subyek hukum yang relatif rentan mengalami tindak kekerasan, seperti wanita, saksi, dan korban kejahatan. Sedangkan kekuasaan

²² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

²³ Dr. Niken Savitri, SH., MCL., *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, Juli 2008, h. 1.

Yudisial bertanggung jawab utama untuk mengadili setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum, berdasarkan hukum.

A. 1. c. Asas-Asas Hukum

Asas-asas hukum merupakan bagian yang sangat penting dan mendasar dalam hukum. Asas hukum merupakan kelengkapan vital dalam legislasi. Ia bukan sekedar hiasan yang bisa dilepaskan begitu saja dari suatu undang-undang tanpa resiko apapun. Ia adalah bagian integral dari suatu undang-undang dan sistem hukum, pengaturan oleh hukum itu dilakukakan baik melalui pasal-pasal maupun asas hukum. Legislator tidak boleh sembarangan atau asal-asalan dalam mencantumkan suatu asas hukum.

Asas hukum sesungguhnya mengatur tetapi dengan cara tidak muncul sebagai aturan yang kongrit. Tidak ada hukum dan sistem hukum yang bisa berjalan tanpa memiliki asas hukum. Mungkin ia dinyatakan secara explisisit, tetapi mungkin juga tersembunyi dibelakang peraturan. Dalam keadaan seperti itu asas hukum akan datang sebagai malaikat penyelamat yang memberikan panduan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan.

Asas hukum memang bukan peraturan, tetapi seperti yang dikatakan oleh Scholten bahwa hukum tidak dapat dipahami dengan baik tanpa asas-asas. Yang menonjol dalam hukum modern adalah pasal-pasal yang dibuat secara rasional. Lebih lanjut Scolten mengatakan bahwa ia berupa arah atau kecenderungan yang datang dari putusan moral kita yang kita tanamkan dalam hukum, berupa pernyataan umum

yang namun demikian tak dapat diabaikan. Fungsi asas hukum menurut Paton mengatakan bahwa asas hukum mengawal dan memberi daya hidup kepada hukum dan bagian-bagian atau bidang dari hukum. Paton menyebutkan sebagai suatu sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang, asas hukum tidak tampil sebagai atauran (Role) yang kongkrit, tetapi lebih berkualitas sebagai kaidah (Norm) dibelakang peraturan.

A. 2. Pengertian Korban KDRT

A. 2. a. Pengertian Korban

Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita²⁴. Moerti Hadiati Soeroso mendefinisikan korban sebagai mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita²⁵. Pengertian lain adalah berasal dari *Van Boven*, yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan²⁶, bahwa korban merupakan orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik ataupun mental,

²⁴ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, h. 49.

²⁵ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 112.

²⁶ Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, Dikeluarkan pada Tahun 1985 sebagai Resolusi PBB Nomor 40/34 Tanggal 29 November 1985.

penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*)²⁷. Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *victim* (korban) didefinisikan sebagai, “a person harmed by a crime, tort, or other wrong”²⁸.

Pengertian-pengertian lainnya mengenai korban adalah bersumber dari Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Diantaranya adalah definisi korban menurut:

- 1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

“Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”²⁹.

- 2) UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”³⁰.

Dari beberapa pengertian “korban” di atas, dapat dimengerti bahwa korban merupakan subyek hukum yang menanggung penderitaan baik fisik maupun mental, kerugian secara ekonomi maupun kehormatannya sebagai manusia, oleh karena hak-haknya yang dirampas, baik dengan perbuatan kejahatan maupun kelalaian yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan, oleh pelaku tindak kejahatan.

²⁷ Rena Yulia, *Op.Cit.*, h. 49-50.

²⁸ Bryan A. Garner, *Op.Cit.*, p. 1703.

²⁹ Pasal 1 angka 3 UU No.23 Tahun 2004

³⁰ Pasal 1 angka 2 UU No.13 Tahun 2006

Dengan demikian, unsur-unsur korban adalah adanya subyek hukum yang mengalami penderitaan, adanya perbuatan melanggar hukum, dan adanya kerugian yang diderita oleh subyek hukum yang mengalami penderitaan. Laki-laki maupun perempuan, berlatar belakang sosial, politik, dan budaya apapun, pendidikan tinggi atau rendah, dapat menjadi korban suatu perbuatan melawan hukum.

A. 2. b. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan, sehingga dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan dalam bentuk apapun, termasuk kekerasan yang terjadi dalam organisasi terkecil dalam masyarakat yang dikenal sebagai rumah tangga atau keluarga.

Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan dan menegaskan dalam Pasal 28I ayat 1 dan 2, bahwa:

- 1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- 2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Faktanya tidak sedikit kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dan melanggar ketentuan-ketentuan yang diamanatkan oleh konstitusi Negara Republik Indonesia dan melanggar asas penghormatan terhadap hak asasi manusia, asas keadilan dan kesetaraan gender, dan non diskriminasi.

Idealnya laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang sama sebagai makhluk yang dicipta oleh Tuhan Yang Maha Esa. Laki-laki dan perempuan

disematkan HAM yang sama oleh Tuhan YME dalam rangka menjamin tegaknya martabatnya. Laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan gender dan tidak bertindak diskriminatif. Dengan penghormatan terhadap keadilan dan kesetaraan gender tersebut, maka setiap orang telah mengimplementasikan penghormatan terhadap martabat manusia.

Dalam penjelasan Pasal 3 huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional³¹. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, diskriminasi didefinisikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat, pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Akibat dari atau turunan tidak dihormatinya prinsip kesetaraan gender tersebut munculah bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang pada umumnya memakan perempuan sebagai korban. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

³¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 angka 1, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga³².

Berkaitan dengan hakikat perbuatan atau tindakan kekerasan dalam rumah tangga tersebut, dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ditegaskan bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan³³. Hal ini berarti perbuatan atau suatu kelalaian yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).

Dengan demikian dapat disimpulkan, korban kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap subyek hukum yang menanggung penderitaan secara fisik maupun mental, kerugian secara ekonomi maupun kehormatannya sebagai manusia, sebagai akibat dari suatu tindakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan ataupun pendiaman yang menyebabkan hilang atau berkurangnya hak-hak asasi, yang dilakukan oleh pelaku kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga. Pemahaman mengenai korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut, secara eksplisit dimuat

³² “Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan”. Anang Zaki Kurniawan, *Hak Korban dalam Penentuan Penghentian Penyidikan atau Penuntutan Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Tesis, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, Juni 2011, h. 88.

³³ Penjelasan UU No. 23 Tahun 2004

dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi, “korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”³⁴.

Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa lingkup rumah tangga adalah:

- a. Suami, istri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dari paparan diatas dapat dimengerti bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga dapat saja seorang suami atau istri, anak, seluruh anggota keluarga yang tinggal satu atap dalam keluarga yang bersangkutan, dan pembantu rumah tangga. Satu contoh peristiwa kekerasan dalam rumah tangga adalah seperti yang dideskripsikan dalam Putusan No. 1390 K/Pid.Sus/2009, dimana terdakwa telah mentelantarkan istri dan kedua anaknya serta secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan dan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap istrinya.

A. 3. Perempuan Sebagai Korban KDRT

Telah dikemukakan bahwa idealnya perempuan dan laki-laki memiliki HAM yang sama karena bersumber pada satu sumber yang sama yakni Tuhan Yang Maha Esa dan beresiko sama besarnya untuk mengalami pelanggaran dan kejahatan HAM.

³⁴ UU No. 23 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95

Dan merupakan satu prinsip hukum yang pasti berlaku universal bahwa baik laki-laki ataupun perempuan, berapapun usia seseorang, dan apapun status sosial, politik, dan budayanya adalah subyek hukum. Namun merupakan suatu fakta dan salah satu fakta tersebut terdeskripsi melalui Putusan No. 1390 K/Pid.Sus/2009, bahwa secara implisit tergambar suatu kehidupan kaum perempuan sering dianggap atau memiliki “label” atau *stereotype* sebagai kaum yang lebih lemah dibandingkan dengan kaum laki-laki. Perempuan menyandang kategori sebagai kaum yang relatif tak terlindungi dan karenanya juga relatif bahkan selalu dalam keadaan yang rentan terhadap resiko mengalami kekerasan dari lingkungan kehidupannya. Kerentanan tersebut menjadikan perempuan sebagai korban kekerasan yang mengalami *fear of crime* yang lebih tinggi dibandingkan kaum laki-laki³⁵. Selain rentan terhadap ancaman kekerasan, pada saat telah menjadi korban pun derita yang dialami oleh kaum perempuan baik pada saat maupun setelah terjadinya kekerasan, pada kenyataannya, jauh lebih traumatis daripada yang dialami oleh kaum laki-laki³⁶.

Konfrensi HAM di Wina pada 1993 menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan yang dialami oleh perempuan didalam keluarga, dalam komunitas maupun kekerasan Negara³⁷. sedangkan menurut CEDAW (*Committee on the Elimination of Discrimination against Woman*), kekerasan terhadap perempuan merupakan kekerasan yang diarahkan terhadap perempuan karena ia adalah seorang perempuan atau dilakukan terhadap atau terjadi terhadap perempuan secara tidak

³⁵ Dr. Niken Savitri, SH., MCL., *Op.Cit.*, h. 3.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Kharina Triananda, *Viktimisasi Sekunder oleh Sistem Peradilan Pidana terhadap Perempuan Korban Kekerasan*, Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, Desember 2011, h. 18.

proporsional, termasuk didalamnya tindakan-tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, mental, atau menyakitkan secara seksual atau bersifat ancaman akan tindakan-tindakan tersebut³⁸.

Berdasarkan Pasal 1 Deklarasi PBB (2003) Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi³⁹. Sedangkan pada Pasal 2 Deklarasi PBB (2003) Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, menyatakan⁴⁰:

“Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada: tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan di masyarakat, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan diluar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan, dan pelacuran paksa. Serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara di manapun terjadinya”.

Dengan demikian, suatu kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas

³⁸ *Ibid.*

³⁹ <http://repository.usu.ac.id/.pdf>, Diakses Tanggal 23 Oktober 2014, h. 2.

⁴⁰ <http://repository.usu.ac.id/.pdf>, *Loc. Cit.*

penghormatan hak asasi manusia, asas keadilan dan kesetaraan gender, dan asas non diskriminasi.

Dalam karyanya, “Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan”, Maidin Gultom memaparkan bahwa bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) macam, yaitu⁴¹:

1) *Physical Abuse* (Kekerasan Fisik)

Bentuk kekerasan seperti ini menunjuk pada cedera yang ditemukan pada seorang anak dan perempuan bukan karena suatu kecelakaan, tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang diulang-ulang.

2) *Physical Neglect* (Pengabaian Fisik)

Kategori kekerasan ini dapat diidentifikasi secara umum dari kelesuan seorang anak dan perempuan, kepucatan dan dalam keadaan kurang gizi.

3) *Emotional Abuse and Neglect* (Kekerasan dan Pengabaian Emosional)

Menunjuk pada kasus di mana orang tua/wali gagal untuk menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seorang anak untuk bisa bertumbuh, belajar, dan berkembang. Kegagalan-kegagalan tersebut dapat dimanifestasikan dengan tidak memedulikan, mendiskriminasi, meneror, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak.

⁴¹ Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum., *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Cetakan Kesatu, PT. Refika Aditama, November 2012, h. 95-96.

4) *Sexual Abuse* (Kekerasan Seksual)

Kekerasan seksual menunjuk pada setiap aktivitas seksual. Bentuk kekerasan ini dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan yang dikemukakan oleh Maidin Gultom diatas “mirip” dengan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti yang termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yakni⁴²:

1) Kekerasan Fisik.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat⁴³.

Sebagai contoh adalah dalam Putusan No. 2645 K/Pid.Sus/2010, dimana terdakwa melakukan kekerasan yang telah menimbulkan penderitaan bagi istri terdakwa atau saksi korban sesuai *Visum et Repertum* No. 119/E-II/VIS/IX/2009 tanggal 26 September 2009.

2) Kekerasan Psikis.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang⁴⁴.

3) Kekerasan Seksual.

Sedangkan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi; pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan

⁴² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95

⁴³ Pasal 6 UU No.23 Tahun 2004

⁴⁴ Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004

terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu⁴⁵.

4) Penelantaran dalam rumah tangga.

Perbuatan menelantarkan berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut⁴⁶.

Sebagai contoh adalah peristiwa KDRT dalam Putusan No. 1390 K/Pid.Sus/2009, dimana terdakwa telah menelantarkan istri dan kedua anaknya serta secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan dan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap istrinya.

Menurut Maria Roy (1977), kekerasan-kekerasan yang menimpa perempuan dalam kehidupan berumah tangga dapat disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah menganggur, kecemburuan, masalah seksual antara pasangan, alkohol, terlalu banyak anak, kehamilan yang tidak direncanakan, sampai kepada penyakit mental yang dialami oleh perempuan⁴⁷.

⁴⁵ Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004

⁴⁶ Pasal 9 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004.

⁴⁷ Dr. Aroma Elmina Martha, SH., MH., *Perempuan dan Kekerasan: Dalam Rumah di Indonesia dan Malaysia*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Januari 2012, h. 143.

Fakta-fakta hukum yang demikian sekali lagi membuktikan bahwa perempuan masih dianggap sebagai “mangsa empuk” para pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, yang sebagian besar adalah kaum laki-laki. Para pelaku telah melanggar prinsip penghormatan HAM, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi, dan aturan-aturan hukum yang berlaku.



B. HASIL PENELITIAN

B.1. Latar Belakang dan Tujuan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga No 23 Tahun 2004

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disahkan Tahun 2004 merupakan hasil perjuangan panjang kelompok perempuan di Indonesia. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berangkat dengan tujuan untuk melindungi perempuan khususnya dari kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan ini sebenarnya masih dapat di lihat dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁴⁸ Dalam penjelasan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau subordinasi, khususnya perempuan (istri), menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, khususnya dalam rumah tangga.⁴⁹

Sebelum diterbitkannya undang-undang, seseorang korban KDRT sangat kesulitan mencari keadilan atau mendapatkan perlindungan atas kejadian yang menimpa dirinya. Karena bukan saja pada saat itu belum ada payung hukumnya, dan juga ada angapan, bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan dalam rumah tangga itu sendiri, sehingga hal itu harus diselesaikan dalam keluarga itu sendiri, secara kekeluargaan, bukan melalui jalur hukum yaitu peradilan. Sehingga korban yaitu istri

⁴⁸ Ester Lianawati, *Konflik Dalam Rumah Tangga (Keadilan dan Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis)*, (Yogyakarta: Paradigma Indonesia (Group Elmatara), t.t.), hal. 153-154.

⁴⁹ Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 89.14

yang seringkali mengadu ke pengadilan di desak untuk mencabut tuntutan (perkara) tersebut, sehingga dapat di lalui melalui jalur musyawarah keluarga.

Dari kasus diatas maka perempuan (istri) di indikasikan telah membuka rahasia tindakan kekerasan yang dilakukan laki-laki (suami) terhadap dirinya, maka hal ini lebih pada tindakan kekerasan yang lebih besar yang akan dilakukan oleh suami kepada istri, dari hal itu maka tidak jarang seorang istri mendapat pemukulan fisik dari suami selama beberapa tahun karena larangan pengajuan kepada pengadilan yang dilarang oleh keluarga.

Namun di sisi lain juga adanya pandangan masyarakat bahwa mengungkap hal yang terjadi dalam rumah tangga adalah suatu hal yang tabu, aib, dan sangat privat, yang tidak perlu intervensi dari pihak luar, termasuk jika masalah rumah tangga itu sebetulnya sudah merupakan bentuk kekerasan. Hal ini sangat diyakini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga hampir tidak pernah ada kejadian/ kasus KDRT dilaporkan kepada pihak yang berwajib bahkan mungkin diutarakan kepada pihak kerabat terdekat pun hampir tidak terlakukan, karena kuatnya keyakinan sebagai suatu aib atau tabu dan akhirnya KDRT menjadi hal yang sangat tertutup atau ditutup-tutupi. Korban pun hanya diam dengan kesedihan dan kesendiriannya dalam memendam perasaan sakit, baik secara fisik maupun psikis atau perasaan-perasaan lain yang pada dasarnya suatu hal yang sangat tidak adil terhadap hak-hak asasi dirinya dan sangat membutuhkan bukan saja perlindungan sosial tetapi juga perlindungan hukum.

Dalam suatu pelaporan atau pengaduan atas KDRT, hal ini praktis mengalami kebuntuan dalam penanganan proses hukumnya, karena belum ada payung hukum.

Sementara hukum yang ada (KUHP) hanya mengenal istilah penganiayaan (kekerasan fisik), sehingga seringkali mengalami kesulitan terutama untuk pembuktian atas kekerasan non fisik, dalam hal ini kekerasan psikis atau bentuk lain. Demikian halnya bahwa belum tersedianya mekanisme untuk penanganan korban, karena memang tidak/ belum tersedia, sehingga korban KDRT seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Hal ini sungguh merupakan bencana bagi siapa pun yang mengalami sebagai korban KDRT, terlebih jika korban adalah perempuan atau anak.

Permasalahan bukan saja terletak pada langkanya aturan hukum, namun pandangan masyarakat, bahwa KDRT adalah suatu aib atau hal yang sangat pribadi juga melingkupi cara pandang para penegak hukum, yang perspektifnya praktis sama yakni sangat patriarkhis. Kepekaan terhadap permasalahan KDRT termasuk kepekaan gender terhadap diri korban masih belum dihayati secara proporsional. Sehingga, harapan besar korban menjadi pupus dan harus menanggung kekecewaan yang cukup berat manakala kasus yang dilaporkannya tidak mendapatkan kepastian hukum dalam prosesnya, hanya karena aparat penegak hukum meyakini bahwa persoalan KDRT adalah bukan permasalahan publik melainkan sebagai permasalahan internal keluarga. Oleh sebab itu melalui kasus-kasus yang terjadi maka di bentuklah hukum KDRT, namun dalam proses pelaksanaan hukum KDRT terjadi juga kasus perceraian di pengadilan agama, yang didalamnya terjadi tindakan kekerasan khususnya terhadap perempuan. Maka MA memutuskan agar para hakim agama mulai dari pusat (Jakarta)

sampai daerah-daerah untuk menangani kasus gugat cerai yang ada unsur KDRT menggunakan undang-undang No. 23 Tahun 2004 sebagai rujukannya⁵⁰.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang juga dirancang khusus untuk merespon kebutuhan korban kejahatan KDRT dan anggota keluarganya adalah penetapan yang berisi perintah perlindungan yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 28-38 UU No. 23 Tahun 2004. Dalam hal ini direspon pertama-tama oleh lembaga pemerintah yang terkait, yaitu kepolisian, dalam hal ini polisi mempunyai penjabaran atas tugas pokok, seperti yang disebutkan dalam Pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu tugas pokok Polri dalam Pasal 13 UU No 2 Tahun 2002, dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf I yang menentukan : “ Melindungi keselamatan jiwa raga, harta, benda, masyarakat, dan lingkungan dan lingkungan dari gangguan ketertiban atau bencana atau termasuk memberikan bantuan dengan menjunjung tinggi HAM.

Dalam hal ini langkah awal yang ditempuh oleh Kepolisian yaitu:

Pasal 26 ayat 1 UU PKDRT menentukan bahwa yang dapat melaporkan secara langsung adanya KDRT kepada polisi adalah korban. Sebaliknya, keluarga atau pihak lain tidak dapat melaporkan secara langsung adanya dugaan KDRT kecuali telah mendapat kuasa dari korban (lihat Pasal 26 ayat 2 UU KDRT).

⁵⁰ Pemerintah DKI Jakarta, Pemetaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) : (laporan pemprof DKI Jakarta dengan lembaga penelitian universitas Padjajaran), Jakarta, 2004, hal.16.

1. Penyelidik atas perintah penyidik dapat dan berwenang melakukan penangkapan.
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.
3. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
4. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa (Pasal 18, ayat 1 KUHAP).

Setelah langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian, maka proses berikutnya adalah :

- a. Memberikan pelayanan dalam bentuk mendirikan ruang dan pelayanan secara khusus (RPK), sebagai tempat penanganan kasus KDRT dan pelanggaran anak.
- b. Membentuk suatu unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dari Mabes hingga Polres,
- c. Meningkatkan jumlah polisi wanita (Polwan) agar mampu mendekati ratio yang ideal. Dengan harapan, Polwan akan menjadi garda terdepan dalam kasus perlindungan Anak dan Perempuan.

- d. Meningkatkan keahlian personil RPK dalam melakukan penyelidikan dan penanganan kasus terhadap perempuan dan anak melalui pendidikan, sehingga akan menambah pengetahuan personil RPK dalam melakukan penyelidikan secara umum. Seperti mendirikan kehadiran reserse kriminal, yang berfungsi sebagai penghubung dengan Departemen Kementrian Pemberdayaan Perempuan.
- e. Memberikan seminar-seminar dan alokasi tentang ketentuan hukuman kepada setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
- f. Menjalin hubungan kerja sama dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan guna menyusun suatu panduan manual sebagai pegangan dalam penanganan kasus KDRT.

Dengan demikian, adapun kasus KDRT yang terjadi melewati instrumen-instrumen diatas maka, Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban (pasal 16). Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan (pasal 18).

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (pasal 19). Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang: identitas petugas untuk pengenalan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap

martabat kemanusiaan; dan kewajiban kepolisian untuk melindungi korban (pasal 20).

Namun seperti adanya laporan tindak kekerasan yang dilakukan kepada perempuan maupun anak kepada polisi, atau korban melapor secara langsung ataupun kuasanya, maka hal itu dapat dipertimbangkan melihat satu kondisi yang dihadapi, dalam melindungi korban. Perlindungan dapat diperpanjang maksimal sampai 1 tahun, namun hal ini harus diajukan sebelum habis masa perlindungan dari 7 hari perlindungan awal. Perpanjangan perlindungan tergantung kepada keterangan korban, setelah itu. Instansi sosial ataupun semua yang terkait dalam hal tersebut, yang diputuskan dalam pengadilan.

Selanjutnya polisi akan menangkap pelaku tanpa surat perintah karena polisi sudah memiliki bukti bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan, namun jika melewati batas waktu 1x24 jam, maka polisi wajib membawa surat perintah yang ada, korban, kepolisian memberikan laporan secara tertulis agar mematuhi perintah perlindungan, namun bila pelaku tidak mengindahkan surat pernyataan tersebut maka pelaku akan ditahan paling lama 30 hari oleh polisi, dengan membawa surat perintah, setelah masa waktu penahanan maka pelaku di putuskan dalam pengadilan mengenai pelanggaran yang dilakukannya seperti yang diatur dalam UU KDRT. Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk (Pasal 31) menetapkan suatu kondisi khusus, yakni pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi, atau mengintimidasi korban. Mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari

perintah perlindungan. Pertimbangan pengadilan dimaksud dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 31). Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan (Pasal 33 (1). Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani (Pasal 33 ayat (2).

Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, dengan kewajiban mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani (Pasal 34). Tetapi juga sebagaimana diatur dalam pasal 44 pasal 1 yang berbunyi “ *seriap orang yang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dipidanakan dengan pidana sebagaimana diatur oleh UU PKDRT no 23 tahun 2004 pidana penjara paling lama tahun (5) atau denda paling banyak 15 juta*”. Implementasi dari UU ini bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku KDRT, namun kenyataan adanya kelemahan dari perlindungan hukum ini, dikarenakan korban hanya dikenakan kurungan beberapa tahun dan jumlah minimal yang ditentukan dalam KUHP. Sedangkan hal itu tidak sebanding dengan korban perempuan yang mengalami luka sangat berat seperti cacat fisik, psikis bahkan kehilangan nyawa.

Lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu tonggak sejarah bagi upaya perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga khususnya kaum perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan. Di samping itu

undang-undang ini juga mengatur tentang langkah-langkah antisipasi lahirnya kekerasan baru serta adanya kejelasan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan.⁵¹ Pembaharuan hukum diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Sehubungan dengan itu, didorong karena adanya suatu kebutuhan karena maraknya tindak kekerasan oleh suami, terhadap anggota keluarganya, yang terjadi dalam rumah tangga. Walaupun secara umum di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan. Namun, tidak sepenuhnya dapat menangani kasus-kasus yang terjadi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dibutuhkan undang-undang khusus (Lex Specialis).⁵² Karena KDRT merupakan suatu perbuatan yang harus dikriminalisasi karena pada dasarnya telah melanggar hak-hak yang hakiki dan fundamentalis yang harus dilaksanakan oleh negara seperti dalam pasal 28 Amandemen UUD 1945, Undang-undang No 7/1984 tentang pengesahan konvensi, Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination*), dan Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam proses pelaksanaan hukum KUHP dan KUHAP terbukti tidak begitu efektif dalam memberikan perlindungan bagi korban KDRT. Karena kedua aturan hukum tersebut masih sangat umum, dengan pertimbangan yang kurang baik dalam

⁵¹ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006), hal.80.

⁵² M. Darin Arif Muallifin, *Diktat Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Tulungagung : Stain GMD, 2003, hal. 5.

melakukan perlindungan kepada korban yang berupaya mengakses perlindungan hukum, terutama karena jenis kelamin (perempuan), sebelum adanya UU No 23 Tahun 2004 seakan-akan tidak adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga, karena pada dasarnya penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selalu terlambat. Dalam arti, korban atau keluarga terkait baru melaporkan kekerasan yang terjadi setelah korban mengalami luka yang sangat parah atau kehilangan nyawa. Perbuatan tersebut pidana tersebut biasanya dituntut berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan matinya korban (Pasal 351 ayat 3 KUHP). Kasus tersebut hanya dimasukan “hanya” dalam golongan perbuatan pidana biasa, bukan yang merupakan sesuatu yang khusus (“*delik*” Kekerasan Dalam Rumah Tangga).⁵³ KUHP dan KUHAP kurang dalam memperhitungkan budaya Patriarkhat yang telah lama melekat pada masyarakat yang bersifat feodal, sehingga mengakibatkan terjadinya diskriminasi jender.

Komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan) mengupayakan pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan, dengan membuat kebijakan tentang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Lahirnya surat kesepakatan bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, dan Kepala Kepolisian RI, Oktober 2002 tentang kerjasama dalam Layanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan, yang disikapi dengan pembentukan pusat penanganan terpadu di rumah sakit kepolisian bhayangkara di seluruh Indonesia adalah terobosan awal kebijakan. Berlanjut dengan disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan

⁵³ Moerti Hidiarti Soeroso, Ibid. hal 6.

kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) yang di dalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Dua tahun kemudian diterbitkan peraturan pemerintah No. 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerja sama pemulihan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada saat yang sama, telah lahir berbagai produk kebijakan di daerah yang mendorong pemberian layanan bagi perempuan korban kekerasan secara terpadu dan berkelanjutan. Dan pada pelaksanaan UU KDRT ini dapat meminimalisir jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini perempuan.

Yang dapat menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga serta melindungi korban.⁵⁴ Sebelum adanya undang-undang No. 23 tahun 2004 penanganan kekerasan dalam ruang tangga selalu terlambat. Artinya, korban atau keluarganya baru melaporkan kekerasan yang terjadi setelah mengalami luka parah atau bahkan telah meninggal. Perbuatan pidana tersebut biasanya dituntut berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan atau Penganiayaan yang menyebabkan Matinya korban (Pasal 351 ayat (3) KUHP). Kasus tersebut “hanya” digolongkan pada perbuatan pidana biasa, bukan merupakan delik khusus yaitu kekerasan dalam rumah tangga.⁵⁵

Dalam hal penganiayaan terhadap istri (*domestic violence*) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan pemberatan hukuman, namun Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengaturnya dalam bab atau pasal

⁵⁴ Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar -Grafika, 2010), hal. 89.

⁵⁵ Ibid., hal. 36.

tersendiri, melainkan sebagian dari pasal penganiayaan terhadap anggota keluarga. Selain itu, KUHP hanya mengakui kekerasan fisik sebagai bentuk kejahatan, tidak mempertimbangkan kekerasan psikis atau seksual⁵⁶. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selain mengatur ikhwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.⁵⁷

B . 2. Materi Muatan Pengaturan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

B.2.1. Perlindungan Terhadap Korban

Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Dalam memberikan perlindungan

⁵⁶ Ibid., hal. 6.

⁵⁷ Ibid., hal. 90

sementara, kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Di dalam UU PKDRT telah dijelaskan mengenai perlindungan korban yang terdapat pada Pasal 5 bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangganya, melalui kekerasan fisik yang dimaksudkan adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat; selain itu juga kekerasan psikis, kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang; dan juga kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu; dan penelantaran rumah tangga dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Jika kedatangan seseorang diperlakukan menurut ketentuan diatas maka ia secara tidak langsung telah menjadi korban, dan oleh sebab itu maka perlu adanya hak-hak yang dimiliki oleh korban sebagai berikut. Mendapatkan perlindungan dari keluarga terkait, tetapi juga kepolisian sebagai aparat penegak hukum dan juga kejaksaan serta pengadilan melainkan juga advokat serta lembaga sosial atau pihak

lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, setelah itu perlu adanya pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis dilengkapi dengan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelayanan kerohanian yang berkaitan dengan kepercayaan guna meningkatkan spritualitas korban. Berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki oleh korban, maka hak tersebut secara langsung menjamin korban KDRT dalam proses pemulihan, dan oleh sebab itu perlu adanya pihak yang turut terlibat didalamnya antara lain tenaga kesehatan; wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya, dalam hal korban memerlukan perawatan. Tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban. Selain itu perlunya pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani yang bertugas wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/ atau memberikan rasa aman bagi korban, oleh sebab itu perlu adanya kerja sama dari tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani dalam tujuan yang sama.

Setelah proses pemilihan terhadap korban maka tahapan proses selanjutnya adalah pemberian ancaman sanksi berupa sanksi-sanksi terhadap pelaku tindak KDRT sebagai berikut : Ketentuan pidana untuk pelaku kekerasan dalam rumah tangga dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu :

- a. Kekerasan Fisik (Ancaman Sanksi)

Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yaitu penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau denda paling banyak Rp 15 juta. Kekerasan fisik yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, yaitu penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun; atau denda paling banyak Rp 30 juta. Kekerasan fisik yang mengakibatkan matinya korban, yaitu penjara paling lama 15 (lima belas) tahun; atau denda paling banyak Rp 45 juta. Kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yaitu penjara paling lama 4 (empat) bulan; atau denda paling banyak Rp 5 juta.

b. Kekerasan Psikis (Ancaman Sanksi)

Kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, yaitu penjara paling lama 3 (lima) tahun; atau denda paling banyak Rp 9 juta. Kekerasan psikis yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yaitu penjara paling lama 4 (empat) bulan; atau denda paling banyak Rp 3 juta.

c. Kekerasan Seksual (Ancaman Sanksi)

Kekerasan seksual, yaitu penjara paling lama 12 tahun; atau denda paling banyak Rp 36 juta. Memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual, yaitu penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun; atau denda paling sedikit Rp 12 juta dan paling banyak Rp 300

juta. Mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, yaitu penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun; atau denda paling sedikit 25 juta dan paling banyak 500 juta.

d. Penelantaran Rumah Tangga (Delik Ancaman Sanksi)

Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga; atau menelantarkan orang lain yang berada di bawah kendali, yaitu penjara paling lama 3 (lima) tahun; atau denda paling banyak Rp 15 juta

B.2.2. Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat

Melalui Undang-Undang ini pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Untuk itu pemerintah harus (pasal 12):

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
- b. Menyelenggarakan komunikasi informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Selain itu, untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan upaya:

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus (RPK) di kantor kepolisian.
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani.
- c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang mudah diakses korban.
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.

Selain pemerintah, masyarakat ikut campur dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini juga menyebutkan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk (pasal 15):

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. Memberikan perlindungan kepada korban;
- c. Memberikan pertolongan darurat;
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi antar suami istri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian (pasal 26 ayat 1). Namun korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau

orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian (pasal 26 ayat 2).

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan (pasal 27). Ini menyangkut kepentingan pemerintah dalam memberi jaminan kepada masyarakat mengenai kepastian hukum dalam KDRT dan juga kepentingan pemerintah dalam upaya pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu di realisasikannya UUD pidana terhadap pelaku kekerasan KDRT sebagai berikut:

B.2.3 Kewajiban Kepolisian

Kewajiban kepolisian memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan serta kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi dalam penanganan kasus KDRT polisi jangan terbatas pada peraturan perundang-undangan KUHP dan KUHP yang merupakan pedoman dan pelaksanaan hukum, tetapi kepolisian harus lebih kepada penerapan perundang-undangan baru yaitu PKDRT agar sesuai dengan prinsip hukum dan pelaksanaan hukum dalam fungsi dan kegunaannya.

B.3. Praktik KDRT

Berdasarkan informasi yang dimuat dalam media sosial menjelaskan bahwa telah terjadi praktik KDRT di Solo, TulungBawang dan Bogor, dan ketiga kasus KDRT tersebut menunjukkan bahwa yang melakukan kekerasan adalah laki-laki atau pihak

suami terhadap istri. Berikut beberapa fakta yang masih terjadi kekerasan dalam kekerasan tangga:

1. **SOLO**—Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kembali terjadi di Kota Solo. Bertepatan dengan Hari Kartini, Minggu (21/4/2013) di Jagalan, seorang suami menghajar istrinya hingga tewas. Korban bernama Yuliantini, 35, warga Kalangan RT 002/RWE 014 Jagalan, Jebres Solo. Sementara pelaku diduga suaminya sendiri, Sukiran, 36. Berdasarkan informasi yang dihimpun *Solopos.com*, Minggu, kejadian bermula dari percecokan antar suami-istri tersebut di kediaman mereka. Pertengkaran itu dilatarbelakangi oleh rencana menghadiri arisan keluarga di Klaten, Minggu sekitar pukul 11.00 WIB. Bermula dari adu mulut itu kemudian terjadi kekerasan fisik. Pelaku sempat menendang korban hingga tak sadarkan diri. Korban kemudian dibawa ke RS Dr Oen Solo. Sesampainya di RS, pihak RS menyatakan korban dinyatakan sudah tak bernyawa.

2. **TULANGBAWANG**- Eli Sateya (27) warga Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Tulang Bawang Barat, Lampung digorok Misrin (30) suaminya sendiri, Rabu 9 18/06/2016). Diduga perbuatan keji Misrin didasari penolakan Eli untuk membuatkan kopi saat disuruh suaminya tersebut. Eli Sateya Wati tewas dengan luka gorok dibagian belakang leher, Eli langsung dibawa keruang UGD puskesmas Poned, Kecamatan Kambu Kibang. Pada saat digorok, korban sedang dalam keadaan duduk tergelungkuk dalam keadaan mencuci pakian, akibatnya kepala korban nyaris putus.

3. BOGOR - Aparat Kepolisian Sektor Dramaga menangkap SA alias Aji, 32 tahun, pria asal Kampung Bubulak, RT 01 RW 08, Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. SA dibekuk karena menganiaya istrinya menggunakan tongkat bisbol.

"Pelaku yang bekerja menjadi sopir pribadi ini kami tangkap sekitar pukul 02.00 tadi saat berada di rumah orang tuanya di Bubulak," kata Kepala Polsek Dramaga Ajun Komisaris Saefudin Gayo, Kamis siang, 5 Mei 2016. Menurut Saefudin, SA ditangkap atas dasar laporan istrinya, Siti Masitoh. Korban mengadukan SA lantaran suaminya itu telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. "Untuk sementara, motifnya karena cemburu dan hubungan keduanya sudah tidak harmonis," ucap Saefudin.

Peristiwa penganiayaan pada pertengahan Maret itu, ujar dia, terjadi karena pelaku cemburu saat mengetahui Siti *mojok* di warung Internet Ciannet di Kampung Cangrang, Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, bersama pria berinisial AS. AS diduga merupakan teman dekat Siti. SA yang terbakar cemburu langsung mendatangi warung Internet itu. Setibanya di lokasi, pelaku langsung memukul korban menggunakan tongkat bisbol yang telah dipersiapkan. "Akibatnya, korban mengalami luka parah pada pelipis mata sebelah kanan," ujar Saefudin.

C. ANALISIS

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu persoalan keseharian bagi Negara Indonesia, dalam persoalan ini, Hak Asasi sebagai Manusia dipertaruhkan. Disamping itu HAM sebagai manusia yang ter subordinasi dalam hal ini KDRT yang didalamnya perempuan (istri) menjadi korban. Oleh sebab itu secara tidak langsung mutlak bagi bangsa Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap warganya. Yang bertujuan untuk menghilangkan, meminimalisir dan melindungi serta menjaga keutuhan setiap rumah tangga dari tindak pidana KDRT, terlebih dari semuanya itu memberikan Hak Asasi bagi setiap warga Indonesia.

Dalam upaya memberikan Hak Asasi dan keadilan bagi rakyat Indonesia, hal ini secara langsung telah di amandemenkan dalam UUD 1945 Negara Republik Indonesia dalam pasal 28 (a) yang berbunyi. *“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Serta Pasal 28b (2) setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*. Secara langsung UUD 1945 telah mengatur hak-hak sebagai manusia dan mensejajarkannya dengan hak-hak sebagai warga negara Indonesia secara hukum, dan juga hak-hak tersebut menjadi dasar bagi realitas masyarakat yang adil dan sejahtera, karena pengembangan dan pembangunan nasional identik dengan pengembangan manusia itu sendiri. Itu berarti fokus dari negara Indonesia dalam pembangunan bangsa Indonesia adalah dengan orang-orang yang hak-haknya dijamin, dikembangkan dan dilindungi oleh negara (Bahar, 1997). Dalam upaya Negara memberikan jaminan HAM bagi setiap warganya maka secara khusus dibuatlah UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan UU No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

Guna memberikan perlindungan tetapi juga tindak pidana bagi setiap warga negaranya, tanpa memandang status dan derajat, sekalipun sebagai aparat negara, dengan berbunyi “ *setiap perbuatan seseorang ataupun kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU maka akan ditindak berdasarkan UU No, 39 Tahun 1999 tentang HAM*. Dan dalam mekanisme serta pengaturan perundang-undangan ini maka harus berpedoman dengan deklarasi PBB tentang penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap wanita serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan hukum secara nasional yang berdasar pada UUD 45 dan TAP MPR RI No XVII/MPR/1998.

Didalam UU No 39 Tahun 1999 ini telah memberikan jaminan untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, semuanya ini berlandaskan kepada suatu tujuan yaitu reformasi hukum di Indonesia yang didalamnya terkandung prinsip utama negara yaitu menjamin hak-hak warga negaranya,

Dari proses memberikan hak-hak kepada setiap warganya tetapi juga wujud dari bentuk hukum di Indonesia, negara kembali memberikan jaminan hak-hak kepada setiap negaranya tidak hanya terbatas sampai kepada hak-hak yang telah dijabarkan diatas, melainkan negara juga memberikan suatu transformasi hukum yang menjamin hak-hak setiap warga negara yang didalamnya mencakup korban dan saksi yang diatur dalam UU yang mempunyai ruang lingkup pada tahapan proses peradilan pidana yang bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi atau

korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan. UU ini pertamakali direncanakan dalam rapat Paripurna ke 13 Tahun 2005 DPR RI Periode 2004-2009, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan korban sebagai wujud dari pemberlakuan bentuk hukum terhadap HAM dan hak perlindungan dari negara.

Tidak sampai disitu saja dalam berkehidupan sebagai warga negara Indonesia sebagai negara hukum tetapi juga sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM, maka Negara secara lebih khusus lagi memberikan serta membuat UU KDRT No 23 Tahun 2004 sebagai suatu amanat dari UUD 45 yang didalamnya memberikan jaminan atas hak serta perlindungan kepada setiap warga negaranya terhadap KDRT, terlebih khusus memberikan jaminan perlindungan kepada perempuan dan anak sebagai kelompok yang ter subordinasi yang menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka dibuat dan diberlakukanya UU KDRT ini yang didalamnya berbunyi “ *adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga.* ” pembuatan UU KDRT ini merupakan upaya pemerintah atau negara mencegah tindak KDRT, menindak pelaku KDRT dan melindungi korban akibat KDRT .

Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa sebagai negara hukum, negara Indonesia telah memberikan kontribusi sebagai negara dunia untuk memberikan dan menjunjung tinggi HAM, sebagai sebuah kontribusi kepada manusia, yang didalam konstitusi negara hal itu diatur dalam Pancasila dan UU 1945 tentang perikemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu Indonesia sebagai negara hukum telah maksimal dalam memberikan kewajiban dan haknya sebagai upaya dan tujuan negara dalam melindungi setiap warga negaranya, seperti yang telah dijelaskan diatas terlebih khusus

melalui UU No 23 Tahun 2004 yang menjadi fokus utama penulis, bahwa segala bentuk kekerasan termasuk KDRT, tidak dapat ditoleransi oleh negara, bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang didalamnya merugikan setiap warga negara terlebih khusus kelompok ter subordinasi. Maka secara langsung akan ditindak tegas oleh hukum melalui UU yang berlaku. Jadi dalam struktur UU KDRT No 23 Tahun 2004 telah telah hak universalisme sebagai manusia dalam perlindungan terhadap HAM tetapi secara khusus dalam hukum Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, khususnya kelompok yang ter subordinasi dalam hal ini perempuan.

